

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Palembang secara administrative tercatat sebagai ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang termasuk salah satu kota tertua di Indonesia yang memiliki catatan sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan sejarah, Palembang adalah salah satu wilayah pelabuhan internasional dimasa lalu dan Palembang adalah salah satu wilayah yang berpengaruh dan dikuasai oleh beberapa kerajaan besar yang terus berganti hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia.¹

Kesultanan Darussalam Palembang merupakan salah satu kerajaan Islam di Indonesia. Kesultanan Palembang didirikan oleh Ki Mas Hindi yang mempunyai gelar Sultan Abdul Rahman Khalifatul Mukminin Syaidul Imam (1659-1702). Sebelum diubah menjadi kesultanan, Palembang merupakan sebuah Kerajaan Palembang yang sudah ada sejak abad ke-XVI. Oleh sebab itu, untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Mataram dan juga menyelaraskan struktur pemerintahan kesultanan yang sesuai dengan ajaran agama islam dan setelah itu disahkan sebagai agama kerajaan dan akhirnya kerajaan Palembang berubah nama menjadi kesultanan.²

Berbicara tentang kesultanan tidak terlepas dari keadaan sosial, ekonomi dan budaya. Pada keadaan sosial masyarakat Palembang hampir sama dengan keadaan sosial di Jawa yang pernah dikuasai oleh Kerajaan

¹<https://www.palembang.go.id/new/beranda/sejarah>, artikel diakses pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 13:15 WIB.

² Farida R. Wargadalem, *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik, 1804-1825*. (Jakarta: Gramedia, 2017), p. 1.

Mataram. Yang mengambil strata sosial dari agama Hindu-Budha. Strata sosial dari agama Hindu-Budha di bagi menjadi tiga golongan yaitu, pertama kata Brahma yang terdiri dari pendeta atau pemimpin agama. Kedua, dari kata Krasria yaitu para raja beserta pengikutnya. Ketiga, Kasta Waliya yaitu golongan pedagang. Keempat, kasta Sudra yaitu kelompok kalangan petani.

Dari sistem kasta diatas masyarakat Jawa kemudian membagi sastra sosialnya menjadi golongan abangan, santri dan priyayi. Istilah pertama abangan yaitu mewakili dari golongan petani. Kedua, santri mewakili dari golongan bagsawan dan pemerintah.³ Di era sekarang disebut dengan Priyayi yaitu yang mempunyai keturunan bangsawan dan mengetahui asal-usul keturunannya sampai raja-raja terbesar. Dalam istilah Priyayi ini berasal dari kata para-yayi yang berarti ialah adik laki-laki maupun adik perempuan raja. Golongan priyayi mempunyai kekuatan yang begitu kuat ada dalam sistem kebudayaan pada masyarakat Indonesia.

Kaum priyayi telah memberi ciri khas tersendiri kepada kebudayaan di Jawa. Semula, kaum priyayi bertugas di istana sebagai orang yang menjadi adik-adik raja baik laki-laki hingga perempuan. Kemudian pengertian tersebut menjadi lebih luas lingkungnya dan seluruh orang yang menjalankan salah satu petugas dari raja disebut priyayi. Akan tetapi, para priyayi tidak terfokus hanya kalangan keraton saja, tetapi dikemudian hari para priyayi terdapat jauh dari kota-kota keraton juga. Pada masa pemerintahan Kesultanan mempergunakan kaum priyayi sebagai salah satu alat administratif.⁴

³ Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, terj. Aswab Mahasin & Bur Rasuanto, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), p. 1.

⁴ Suffrides de jong, *Salah satu Sikap Orang Jawa*, terj. (Yogyakarta: Yayasan Kansius, 1976), p. 70.

Ciri khas orang priyayi adalah mempunyai gaya hidup yang terdiri dari kegiatan aktivitas sehari-hari, lambang-lambang, dan adat istiadat beserta kegiatan upacaranya. Hal menarik dalam gaya hidup golongan kaum priyayi yaitu didalamnya mempunyai nilai-nilai dan ide-ide yang dapat mewakili sebuah gambaran hidup orang Jawa. Golongan priyayi merupakan salah satu bagian dari orang Jawa dan dijadikan cerminan orang Jawa itu sendiri yang bersifat fleksibel juga terbuka terhadap kebudayaan asing, tetapi para priyayi tetap bisa menjaga dan mempertahankan nilai-nilai ketradisionalnya.⁵

Pada masa kesultanan Palembang, struktur di Palembang terdiri dari dua golongan yaitu golongan priyayi dan golongan rakyat. Priyayi merupakan sekelompok orang yang mempunyai kedudukan terhormat ditengah masyarakat karena priyayi keturunan sultan atau kaum ningrat (garis keturunan) maupun orang yang berkedudukan karena diangkat oleh sultan. Priyayi terdiri dari tiga tingkatan, yaitu: Pangeran, Raden, dan Masagus. Untuk golongan rakyat, golongan rakyat dapat dilihat dari strata sosial-budaya yang terdiri dari empat kelompok yaitu orang miji, orang senai, orang yang menggadaikan diri, dan budak.⁶

Pada masa Kesultanan Darussalam Palembang mempunyai kebijakan-kebijakan dalam segi hal yang berbeda-beda, baik dari segi sosial budaya, ekonomi, agama, dan politik. Salah satu diantaranya yaitu dari segi ekonomi, dalam hal ini sistem monopoli perdagangan yang disebut dengan istilah *Tibang (Tiban) dan Tukang (Tukon)*. Tibang adalah pertukaran wajib

⁵ Astri Rahayu, "Pandangan Hidup Priyayi Jawa dalam Teks Idjol Pegawejan", Skripsi, (Depok: Jurusan Sastra Jawa, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia), 2008, p. 1.

⁶ Astri Rahayu, "Pandangan Hidup Priyayi Jawa dalam Teks Idjol Pegawejan", Skripsi, (Depok: Jurusan Sastra Jawa, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia), 2008, p. 2.

barang-barang dari luar negeri atau impor. Tukong adalah pertukaran barang dari daerah pedalaman dengan uang. Barang yang digunakan untuk tibang yaitu baju Jawa, kain bengala putih, kapak/parang besi dan garam. Barang-barang tersebut biasanya nilainya dikalikan dengan seratus atau bahkan sedikit diselewengkan sampai dua ratus. Untuk diluar produk di atas tidak diperbolehkan ke dalam *Tibang Tukang*, seperti lada, kopi, lilin, gading gajah, katun, tembakau, dan terutama beras. Berkaitan dengan tukang, disebutkan bahwa penggunaan uang di pemerintahan Kesultanan Darussalam Palembang adalah menata peredarannya. Uang yang digunakan umumnya Dolar, dan juga mata uang lokal yang dikeluarkan oleh pihak kesultanan, yaitu uang pitis dan uang dukotan.⁷

Dalam kebijakan Tibang Tukang mengalami kemunduran karena adanya penyerangan dari Inggris terhadap Kesultanan Darussalam Palembang yang menyebabkan mundurnya Sultan Mahmud Badruddin II ke uluan pada tahun 1812. Setelah mundurnya Sultan Mahmud Badaruddin II menyebabkan Sultan Ahmad Najamuddin II tidak memiliki kekayaan dan kehilangan sumber pendapatan utama. Sumber pendapatan Kesultanan Palembang Darussalam yaitu lada dan timah yang di serahkannya Pulau Bangka-Belitung kepada Inggris, dan gangguan keamanan yang diperintahkan oleh Sultan Mahmud Badruddin II dari daerah Rawas.⁸

Keberadaan kaum priyayi di Kota Palembang sebagai golongan terhormat di tengah kehidupan sosial dan politik di Kota Palembang telah menunjukkan sejumlah peran yang begitu menarik. Semula yang awalnya menjadi seorang bangsawan, kaum priyayi diketahui mendapatkan jabatan

⁷ Farida, "Perekonomian Kesultanan Palembang", *Jurnal Sejarah Lontar*, Vol.6, No. 1 (2009), p. 4-5

⁸ Farida, "Perekonomian Kesultanan Palembang", *Jurnal Sejarah Lontar*, Vol.6, No. 1 (2009), p. 5.

dalam pemerintahan di Kesultanan Palembang Darussalam, seketika berubah pasca runtuhnya Kesultanan Palembang Darussalam oleh Belanda pada tahun 1821.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin mencoba lebih mendalam tentang bagaimana kehidupan para kaum priyayi pada masa Keresidenan Palembang, yang mana para bangsawan atau priyayi tersebut kesultanan Palembang yang ditaklukkan oleh Belanda dan dihapusnya Kesultanan Palembang, yang membuat hak dan kekuasaan para priyayi dibatasi. Penulis memfokuskan pada pembahasan golongan priyayi pada tingkatan Pangeran dan Raden, dikarenakan tingkatan tersebut paling dominan dalam keluarga priyayi dan mempunyai kehidupan dan peran yang sangat banyak pada zaman Hindia-Belanda. Oleh karena itu, penulis akan mengambil judul skripsi yang berjudul **“DAMPAK KEJATUHAN KESULTANAN DARUSSALAM PALEMBANG TERHADAP KEHIDUPAN KAUM PRIYAYI TAHUN 1821-1881 M”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat ditetapkan pada rumusan masalah ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran Umum Kesultanan Darussalam Palembang?
2. Bagaimana Kaum Priyayi Di Kota Palembang Tahun 1821-1881 M?
3. Bagaimana Dampak Jatuhnya Kesultanan Darussalam Palembang Terhadap Kaum Priyayi Tahun 1821-1881?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah terwujudnya deskripsi yang dapat menyelesaikan langkah:

1. Gambaran Umum Kesultanan Darussalam Palembang.
2. Kaum Priyayi Di Kota Palembang Tahun 1821-1881 M.
3. Dampak Jatuhnya Kesultanan Darussalam Palembang Terhadap Kaum Priyayi Tahun 1821-1881 M.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk melakukan sebuah karya ilmiah, penulis memerlukan kajian, dengan tujuan untuk memperkokoh data-data atau teori yang nanti menjadi landasan untuk penulis. Tinjauan pustaka adalah kajian terhadap acuan atau rujukan yaitu karya tulis yang menjadi landasan pemikiran dalam penulisan. Melalui tinjauan pustaka, penulis memperoleh bahan pustaka ataupun literatur yang dipakai dalam penulisan sejarah. Kajian pustaka merupakan hasil jawaban sementara dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan.

Adapun beberapa tinjauan pustaka yang penulis gunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Karya ilmiah dari kgs. M. Hafiz yang berjudul *Perekonomian Palembang masa Kesultanan sampai Masa Kolonial Belanda (1136-1360 H/1724-1942M)*.⁹ Karya ilmiah ini berisi tentang sejarah Kesultanan Darussalam Palembang, bentuk, struktur administrasi, serta perekonomian dari zaman kesultanan sampai masa kolonial Belanda.

⁹ Kgs. M. Hafiz, "Perekonomian Palembang Masa Kesultanan Sampai Masa Kolonial Belanda (1136 H-1360 H/1724 M-1942 M)", *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2021).

Kedua, buku karangan Jeroen Peeters yang berjudul *Kaum Tuo – kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*.¹⁰ Yang membahas tentang kenyataan terhadap konflik-konflik yang pernah terjadi di daerah Keresidenan Palembang. Konflik-konflik tersebut terjadi disebabkan adanya perbedaan pemahaman keagamaan dari kelompok modernis (Kaum-Mudo) dan kelompok tradisional (Kaum-Tuo). Selain itu, buku karangan Jeroen Peeters yang berjudul *Kaum Tuo – Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942* membahas islamisasi dan tradisional di Palembang, peran Kaum Tuo- Kaum Mudo di Palembang.

Ketiga, buku dari Farida R. Wargadalem yang berjudul *Kesultanan Palembang dalam Pusaran konflik 1804-1825*¹¹. Di dalam buku ini Farida R. Wargadalem yang berjudul *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik 1804-1825* menulis tentang bagaimana konflik dan posisi Kesultanan Palembang Darussalam dalam konflik yang terjadi pada tahun 1804-1825.

Keempat, buku dari J.I Van Sevenhoven yang berjudul *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*.¹² Menjelaskan gambaran masyarakat dan sejarah Kota Palembang baik dari aspek asal usul, kondisi geografis, penduduk, status sosial, struktur pemerintahan, adat istiadat, industri, perdagangan, dan sosok Mahmud Badaruddin.

Kelima, buku dari P. De Roo De La Faile yang berjudul *Dari Zaman Kesultanan Palembang*.¹³ Menjelaskan tentang Kesultanan Palembang

¹⁰ Jeroen Peeters, *Kaum Mudo-Kaum Tuo Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, terj. Sultan Maimoen, (Jakarta: INS, 1997).

¹¹ Farida R. Wargadalem, *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik 1804-1825*, (Jakarta: Gramedia, 2017).

¹² Van Sevenhoven, *Lukisan Ibu Kota Palembang*, terj. Sugarda Purbakawatja, (Djakarta: Bhratara, 1971).

¹³ P. De Roo De Faile, *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, terj. Soegarda Poerbakawatja, (Djakarta: Bhatara, 1971).

dalam tiga hal, pertama kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kedua, beberapa ciri khas dari kerajaan maritime yang berbeda sifatnya dengan kerajaan agraris. Ketiga corak hubungan dan konflik antara kerajaan di tanah air kita dengan VOC.

E. Kerangka Pemikiran

Dari penjelasan diatas peneliti mengambil dan mengkaji konsep social-politik pada masa Karesidenan Palembang yang mana kaum priyayi atau kaum ningrat sangat dominan dan juga menjadi penguasa di Kesultanan Darussalam Palembang dan berubah ketika Kesultanan Palembang Darussalam dihapuskan oleh Belanda tahun 1821. Berdasarkan pertimbangan perlunya teori-teori terhadap penelitian dan penulisan sejarah, sehingga peneliti akan menggunakan beberapa teori yaitu diantaranya teori stratifikasi sosial dan fungsional structural.

Menurut Pitirin A. Sorokin, teori stratifikasi sosial adalah perbedaan masyarakat ataukelompok dalam strata-strata secara bertingkat (secara hierarki). Perwujudannya adalah kasta yang lebih tinggi dan kasta yang lebih rendah. Dasar dan pokok-pokok dalam lapisan-lapisan masyarakat adalah tidak mempunyai keseimbangan terhadap pembagian hak-hak dan kewajiban, kewajiban dan tanggungjawab, nilai-nilai sosial dan pengaruhnya terhadap anggota masyarakat.¹⁴

Teori fungsional struktural adalah suatu teori yang utuh dan sangat besar pengaruhnya terhadap ilmu sosial di abad sekarang. Pemikiran tersebut dihasilkan oleh pemikiran biologis yang beranggapan bahwa masyarakat sebagai organisme biologis, yaitu terdiri dari organ-organ atau

¹⁴ Mestika Zed, *Metodelogi Sejarah*, (Padang: Universitas Negeri Padang, 1999), p 40

bagian-bagian yang saling memerlukan. Ketergantungan atau memerlukan dampak atau akibat agar organisme itu dapat bertahan hidup.

Konsep atau sketsa masyarakat sebagai organisme memperkenalkan dalam tiga asumsi yang merupakan ciri khas pemikiran fungsionalisme dalam sosiologi, yaitu kenyataan sosial yang dilihat atau divisualisasikan sebagai pola, proses suatu pola tersebut hanya bisa dipahami dalam kerangka hubungan ketergantungan antara bagian-bagiannya sebagaimana dengan organisme, suatu pola terhadap cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menjaga integritas dan batas-batasannya.

F. Metode Penelitian

Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang masa lalu. Menurut Kuntowijoyo, sejarah merupakan ilmu yang membahas tentang manusia dan waktu, sesuatu hal yang mempunyai makna sosial dan sesuatu tersentu yang mendalam.¹⁵ Sebagai ilmu sejarah tergabung dalam prosedur ilmiah. Sejarah mempunyai metode sendiri dalam menjelaskan peristiwa yang terjadi di masa lalu sehingga dapat menghasilkan sebuah tulisan yang tepat, ilmiah, dan faktual.

Metode sejarah adalah sebuah rancangan untuk melakukan uji dan menganalisis kebenaran rekaman dan jejak peninggalan masa lalu dengan melakukan analisis yang tepat untuk data-data yang telah ada sehingga muncul sebuah penyampaian cerita sejarah yang actual dan nyata. Metode sejarah dapat didefinisikan sebagai metode penelitian dan penulisan dengan melakukan cara, mekanisme, dan teknik yang terancang dengan baik sesuai kaidah dan susunan ilmu sejarah.¹⁶

¹⁵ Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Bentan Budaya, 1993), p 17.

¹⁶ Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah Islam, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), p 104.

Adapun penulisan ini memulai tahapan-tahapan penulisan sejarah yang dilakukan oleh Louis Gootschalk yang terdiri dari empat tahapan sebagai berikut:

1. Heuristik

Tahapan yang pertama yang dilakukan oleh seorang peneliti yaitu Heuristik (mengumpulkan sumber data). Heuristik, berasal dari kata Yunani yaitu Heirisei, yang berarti menemukan atau mendapatkan. Menurut G.J Reiner, heuristic ialah suatu cara, suatu karya, dan tidak suatu ilmu. Sumber sejarah bisa berbentuk bukti yang telah dilewatkan oleh manusia dan sudah menampakan semua aktifitasnya di masa lalu baik berupa bentuk peninggalan-peninggalan serta tulisan-tulisan.

Adapun sumber yang digunakan oleh peneliti ini adalah Sumber Primer (pokok) dan Sumber Sekunder (pendukung). Sumber primer yaitu sumber atau data yang menjadi prioritas dalam sebuah penelitian, sumber primer mempunyai keterkaitan dengan sumber pokok yang dirancang dalam sebuah penelitian. Sementara itu, sumber sekunder yaitu sumber pendukung yang untuk melengkapi sumber utama. Sumber tersebut dapat berupa buku, majalah, foto, dan lain sebagainya.

Sumber Sekunder di dalam penelitian tersebut penulis menggunakan buku karangan Farida R. Wargadalem yang berjudul *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik 1804-1825*, buku karangan Djohan Hanafilah yang berjudul *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menengakan Kemerdekaan*, buku karangan Jeroen Peeters yang berjudul *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*.

Sekunder itu juga dalam penelitian ini penulis menggunakan jurnal M. Hafiz yang berjudul *Palembang masa Kesultanan sampai*

Masa Kolonial Belanda (1136-1360 H/1724-1942 M), buku karangan Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi yang berjudul *Kesultanan Palembang Darussalam*, buku karangan Team Perumus Hasil-hasil Diskusi Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II yang berjudul *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II*, buku karangan P. De Roo La Faille yang berjudul *Dari Zaman Kesultanan Palembang*.

2. Kritik

Merupakan metode yang digunakan untuk menyelidiki, menilai dan menguji sumber-sumber yang diperoleh guna melihat kredibilitas dan autensitasnya sumber yang di dapat. Kritik dalam penelitian sejarah terdapat dua macam jenis, yaitu: Kritik Intern untuk menakar kebenaran tentang keaslian sumber (Kredibilitas) sedangkan Kritik Ekstern untuk memeriksa kebenaran tentang keaslian sumber (orisinalitas).

3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran sejarah sering kali disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Namun keduanya, dalam pandangan Kuntowijoyo, sebagai metode – metode utama dalam interpretasi.

Terdapat dua hal yang penting dalam tahap interpretasi. Pertama, analisis yaitu penguraian terhadap fakta yang didapatkan, Analisis sejarah bertujuan untuk melakukan penafsiran atas fakta-fakta yang diperoleh dari sumber – sumber sejarah dan bersama dengan teori disusun menjadi interpretasi. Kedua, adalah sintesis yaitu proses

menyatukan semua fakta yang telah diperoleh sehingga tersusun sebuah kronologi peristiwa dalam bentuk rekonstruksi sejarah.

4. Historiografi

Historiografi secara bahasa merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *histori* yang berarti sejarah dan *grafi* memiliki arti deskripsi/penulisan. Kata *Historia* sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu. Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya, kata “*historia*” dipakai untuk pemaparan mengenai tindakan – tindakan manusia yang bersifat kronologis terjadi di masa lampau.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan, dalam penelitian ini disusun menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, adanya sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Gambaran Umum Kesultanan Darussalam Palembang, Meliputi Latar Belakang Kesultanan Darussalam Palembang, Perkembangan Kesultanan Darussalam Palembang dan Kehancuran Kesultanan Darussalam Palembang

Bab III : Kaum Priyayi di Kota Palembang Tahun 1821-1881, Meliputi Kehidupan Dalam Bidang Pendidikan Keagamaan, Kehidupan Dalam Bidang Sosial, Kehidupan Dalam Bidang Ekonomi, dan Kehidupan Dalam Bidang Politik.

Bab IV : Dampak Kejatuhan Kesultanan Darussalam Palembang Terhadap Kehidupan Kaum Priyayi tahun 1821-1881, Meliputi Dampak Dalam Bidang Pendidikan Keagamaan, Dampak Dalam Bidang Sosial, Dampak Dalam Bidang Ekonomi dan Dampak Dalam Bidang Politik.

Bab V : Penutup meliputi Kesimpulan dan Saran.